

RUPS TAHUNAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TAHUN 2023

RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2023

Hari/Tanggal	26 Januari 2023
Tempat	Kantor Kementerian BUMN Lantai 21 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat

Agenda	Keputusan
Mata Acara 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) tahun 2023.
Mata Acara 2: Persetujuan Indikator Aspek Operasional Tahun 2023 untuk menghitung tingkat Kesehatan perusahaan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-076/KOM/ PIHC/XII/2022, tanggal 22 Desember 2022	Menyetujui Indikator Aspek Operasional tahun 2023 untuk menghitung Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.
Mata Acara 3: Penetapan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023.	Menetapkan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023.
Mata Acara 4: Penetapan Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
Mata Acara 5: Penetapan Penugasan Pemerintah (PSO) mulai Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2023	Menetapkan penugasan Pemerintah (PSO) mulai Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2023.
Realisasi	Akta Notaris No. 01 tanggal 26 Januari 2021

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020

Hari/Tanggal	6 Juni 2023
Tempat	Ruang Rapat Amanah III Kantor Kementerian BUMN Lantai 8 Jl Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat

Agenda	Keputusan
<p>Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseoran selama tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Pengesahan laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022</p>	<ol style="list-style-type: none">a. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja Wibisana, Rintis & Rekas sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00316612.1025/AU,1/04/11/22 3/1/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku Tahun 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana lampiran Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat.

<p>Mata Acara 2: Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vollegid acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022</p>	<p>Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2022 serta Mengesahkan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya No. N20230331011/DC2/THA/2023 tanggal 31 Maret 2023, dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku Tahun 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana lampiran Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat.</p>
<p>Mata Acara 3: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian perseroan Tahun Buku 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp18.461.812 juta (delapan belas triliun empat ratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta rupiah) sebagai berikut: sebagaimana lampiran Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. <ol style="list-style-type: none"> a. sebesar 27,33% (dua puluh tujuh koma tiga tiga persen) atau Rp5.046.000 juta (lima triliun empat puluh enam miliar rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham; b. b. sebesar 72,67% (tujuh puluh dua koma enam tujuh persen) atau

	<p>Rp13.415.812 juta (tiga belas triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus dua belas juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan Perseroan. 2.</p> <p>2. Dividen sebesar Rp5.046.000 juta (lima triliun empat puluh enam miliar rupiah) agar disetor kepada rekening bendahara umum negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan ini dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan.</p>
<p>Mata Acara 4: Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas kinerja Tahun Buku 2022.</p>	<p>Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2022, akan ditetapkan secara tersendiri. Sebagaimana lampiran Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat.</p>
<p>Mata Acara 5: Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagaimana lampiran Akta Notaris No.01 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. 2. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan

	Publik pengganti tersebut.
--	----------------------------

